

# Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Komputer dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru

Yustinus Lambyombar<sup>1</sup>,  
Selva Temalagi<sup>2</sup>

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Komputer dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Populasi dalam penelitian ini adalah Seluruh Pegawai pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru. Sampel dalam penelitian ini adalah Pegawai yang bekerja pada bagian akuntansi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *Purposive Sampling*. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner dan diukur dengan menggunakan analisis regresi berganda yang pengolahannya melalui *software* SPSS 23. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa SIA berbasis komputer tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan sedangkan SPIP berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

**Kata Kunci:** Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Komputer, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Laporan Keuangan

## Abstract

*This research aims to empirically test the influence of Computer-Based Accounting Information Systems and Government Internal Control Systems on the Quality of Financial Statements. The population in this study is all employees in the Regional Government of Aru Islands Regency. The sample in this study is an employee who works in the accounting department of the Aru Islands Regency Regional Government. The sampling technique used is Purposive Sampling. The research method used is quantitative research method. The data was obtained through the dissemination of questionnaires and measured using multiple regression analysis processed through SPSS 23 software. The results of this study showed that computer-based SIA has no effect on the quality of financial statements while SPIP has a significant positive effect on the quality of financial statements.*

**Keywords:** *Computer-Based Accounting Information System, Government Internal Control System, Financial Statements*

---

<sup>1</sup>PSDKU Aru, Universitas Pattimura, email: [tinhocoolz@gmail.com](mailto:tinhocoolz@gmail.com)

<sup>2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pattimura email: [selva\\_temalagi@yahoo.com](mailto:selva_temalagi@yahoo.com)

## **PENDAHULUAN**

Salah satu elemen penting dalam menunjang kegiatan operasional (bisnis) suatu perusahaan adalah pencatatan keuangan (laporan keuangan). Pencatatan keuangan yang dilakukan dan disajikan dengan baik dan benar, akan memudahkan stakeholders perusahaan dalam menganalisis kinerja keuangan perusahaan, pada awalnya, pencatatan data keuangan ini dilakukan secara manual, yaitu dengan menggunakan kertas, dan itu berlangsung hingga tahun 1980-an. Namun, dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat, pencatatan keuangan sistem manual secara perlahan mulai ditinggalkan.

Saat ini, sebagian besar atau bahkan hampir semua perusahaan sudah menggunakan pencatatan keuangan dengan menggunakan sistem komputer karena dinilai lebih efisien dan efektif, pencatatan keuangan (akuntansi) dengan menggunakan komputer inilah yang kemudian disebut sebagai komputerisasi akuntansi (sistem akuntansi berbasis komputer). Inilah latar belakang dan sejarah komputer akuntansi yang perlu diketahui.

Berkaitan dengan pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), menyebutkan bahwa Sistem Informasi Keuangan Daerah adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah. Sedangkan informasi keuangan daerah adalah segala informasi yang berkaitan dengan keuangan daerah yang diperlukan.

Dalam rangka penyelenggaraan sistem informasi keuangan daerah. Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi prinsip - prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 2005. Laporan keuangan pemerintah kemudian disampaikan kepada DPD/DPRD dan masyarakat umum setelah di audit oleh badan pemeriksa keuangan. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru merasakan manfaat penggunaan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan kepada sektor publik. Diharapkan dengan kemudahan penggunaan yang diberikan teknologi informasi, dapat berdampak positif pada pemerintahan daerah Kabupaten Kepulauan Aru, karena pada umumnya teknologi informasi sudah terbukti dapat memberikan kemudahan dalam membantuk kegiatan di sektor publik dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.

Untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan merupakan salah satu bentuk agent kepada principal. Bilamana terjadi kepentingan yang berbeda antara principal dan agent maka akan menimbulkan masalah keagenan, sehingga mereka dapat memiliki persepsi yang berbeda untuk mengitrepertasikan laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian di penyelenggara pemerintahan di tuntutan harus mampu mengaplikasikan sistem informasi dalam semua pekerjaannya. Namun banyak kedapatan para penyelenggara pemerintahan yang juga belum mampu dengan maksimal mengaplikasikan sistem tersebut.

Berbagai hal yang ditemui oleh penyelenggara pemerintahan dalam bidang masing-masing yang masih banyak menggunakan tenaga pembantu, dalam hal ini operator pelaksana dalam melakukan berbagai tanggungjawab pekerjaan.

Kinerja merupakan kondisi yang harus diketahui dan diinformasikan kepada pihak-pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi dihubungkan dengan visi yang dikembangkan suatu organisasi serta mengetahui dampak positif dan negative suatu kebijakan operasional yang diambil.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah sistem pengendalian internal pemerintah itu sendiri. Pada tahun 2008 pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Dalam PP tersebut menyebutkan bahwa tujuan SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan untuk memadai bagi tercapainya: a.) Efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Negara; b.) Kendala laporan keuangan; c.) Pengamanan asset Negara; dan d.) Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sementara dalam penelitian Dedi Rianto (2013) menyebutkan bahwa kualitas sumberdaya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap keterandalan dan ketepatan waktu, serta pengendalian internal akuntansi berpengaruh signifikan terhadap keterandalan. Hal ini didukung oleh penelitian Nyoman (2013) yang menunjukkan bahwa kapasitas sumberdaya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan system pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Adapun yang melatar belakangi penelitian ini karena dari beberapa periode, Kabupaten Kepulauan Aru mendapat predikat disclaimer atau tidak memberikan pendapat dari badan pemeriksa keuangan (BPK) atas pertanggung jawaban pengelolaan keuangan berupa Laporan Keuangan Pemerintah dan juga menemukan permasalahan atas sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2019 hasil telusuran media online (<http://www.malukuterkini.com/2020/07/07bpk-lkpd-kabupaten-arumasi-disclaimer>). Opini BPK ini merupakan salah satu ukuran pertanggungjawaban dalam bidang pengelolaan keuangan, sehingga kemungkinan bahwa laporan keuangan Kabupaten Kepulauan Aru yang belum maksimal. Karena dalam instansi pemerintahan tersebut kurang memadainya computer, jaringan maupun sumber daya manusia yang di sediakan di dalam pemerintahan tersebut sehingga menghambat transparansi laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah, sebab dimana pengguna informasi keuangan penting di lakukan karena pengguna data mengetahui kondisi keuangan suatu daerah dengan melakukan analisis.

Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Aru sesuai Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di Propinsi Maluku ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ); termasuk dalam Kabupaten yang di sahkan oleh pemerintah pusat sebagai daerah otonom.

Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (pasal 1 huruf (h) U.U. Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah). Dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 5 otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus

sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Sesuai Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku.

Adapun beberapa pantauan terkait peran Aparatur Sipil Negera di kabupaten Kepulauan Aru, yang dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya masih menggunakan tenaga *operator computer* sebagai asisten dalam membantu menyelesaikan berbagai pekerjaannya, hal ini dapat berarti banyak dari pegawai yang belum mampu mengetahui dengan maksimal cara mengoperasikan sistem, baik sistem informasi atau Sistem Informasi Akuntansi berbasis komputer, kurangnya peran atasan tertinggi dalam mengontrol bawahannya dalam pertanggungjawaban pekerjaan masing – masing, *Lost Control* yang demikian sangat berpengaruh pada ketepatan waktu penyampaian hasil kinerja para bawahan pada level terendah.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Hasnidar (2016) yang telah meneliti tentang Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Komputer dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Keuangan Di Instansi Pemerintahan Kabupaten Bone. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian dan juga pada populasi yang digunakan. Objek pada penelitian sebelumnya adalah Kabupaten Bone sedangkan objek dalam penelitian ini adalah Kabupaten Kepulauan Aru. Pada penelitian sebelumnya, populasi yang digunakan dalam penelitian adalah pengguna eksternal yaitu DPRD Kabupaten Bone sedangkan populasi dalam penelitian ini adalah para Aparatur Sipil Negera (Bendahara dan pejabat pengambil keputusan) pada Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Kepulauan Aru.

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 1) Apakah sistem informasi akuntansi berbasis komputer berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan? 2) Apakah sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?

Sehubungan dengan latar belakang serta identifikasi masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk menguji secara empiris pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Komputer terhadap Kualitas Laporan Keuangan. 2) Untuk menguji secara empiris pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat yaitu sebagai berikut: 1) Bagi Pemerintah Daerah, diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Daerah khususnya mengenai sistem akuntansi berbasis computer dan sistem pengendalian intern pemerintah, dan diharapkan juga dapat memberikan sumbangan penelitian dalam menilai dan mengevaluasi sistem yang sedang berjalan dalam rangka menyempurnakan praktik-praktik Sistem Informasi Berbasis Komputer yang dianggap telah memadai. 2) Bagi pihak lain, diharapkan dapat menjadi bahan referensi atau masukan untuk penelitian selanjutnya, khususnya mengenai topik-topik yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

### **Kajian Teori**

*Technology Acceptance Model* (TAM) merupakan salah satu model yang dibangun untuk menganalisis dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi diterimanya penggunaan teknologi komputer yang diperkenalkan pertama kali oleh Fred Davis pada tahun 1986. TAM merupakan hasil pengembangan dari Theory of Reasoned Action (TRA), yang lebih dahulu dikembangkan oleh Fishbein dan Ajzen pada 1980. TAM bertujuan untuk menjelaskan dan memperkirakan penerimaan (*acceptance*) pengguna terhadap suatu sistem informasi. TAM menyediakan suatu basis teoritis untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan

terhadap suatu teknologi dalam suatu organisasi. TAM menjelaskan hubungan sebab akibat antara keyakinan (akan manfaat suatu sistem informasi dan kemudahan penggunaannya) dan perilaku, tujuan/keperluan, dan penggunaan aktual dari pengguna/user suatu sistem informasi.

Fishbein dan Ajzen (1975 dalam Sanjaya, 2005). TRA merupakan model yang secara luas mengkaji psikologi sosial mengenai perilaku seseorang yang dilakukan secara sadar. Berdasarkan TRA, minat berperilaku berkaitan erat dengan perilaku spesifik individu dan merupakan proses yang dilakukan secara sadar. Sedangkan sikap dan norma subyektif adalah anteseden perilaku tersebut. Sikap merupakan perasaan positif atau negatif tentang target perilaku, sedangkan norma subyektif adalah persepsi seseorang tentang orang lain atau sekelompok orang atau referensi lainnya yang memikirkan apa yang dilakukan atau tidak harus dilakukan mengenai perilaku tertentu. Dalam konteks teknologi informasi (dalam penelitian ini penggunaan internet), para peneliti akan mengidentifikasi keyakinan yang menonjol pada subjek berdasarkan pada investigasi sebelumnya. Atribut-atribut yang menonjol berkaitan dengan teknologi informasi secara tidak langsung dapat mempengaruhi minat dan norma subyektif dan selanjutnya dikelompokkan sebagai variabel internal. Dengan demikian TRA menangkap variabel-variabel internal melalui beberapa variabel eksternal yang berkaitan dengan teknologi informasi (Palupi dan Tjahjono, 2010).

Sistem Informasi Akuntansi adalah suatu sistem dalam sebuah organisasi yang bertanggung jawab untuk penyiapan Informasi yang diperoleh dari pengumpulan dan pengolahan data transaksi yang berguna bagi semua pemakai baik di dalam maupun di luar perusahaan.

*Computer Based Information System* (CBIS) atau yang dalam Bahasa Indonesia disebut juga Sistem Informasi Berbasis Komputer merupakan sistem pengolah data menjadi sebuah informasi yang berkualitas, berguna bagi penerimanya, dan dipergunakan untuk suatu alat bantu pengambilan keputusan. Sistem Informasi “berbasis komputer” mengandung arti bahwa komputer Menurut Turban (dalam Kusrini, 2006) Sistem pakar adalah program computer yang menirukan penalaran seorang pakar dengan keahlian suatu wilayah pengetahuan tertentu.

Amin Widjaja Tunggal (2010:195) berpendapat bahwa “ Pengendalian Internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh Dewan Komisaris, Manajemen, dan Personal entitas lain yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini: (a) keandalan pelaporan keuangan (b) Efektifitas dan efisiensi operasi, dan (c) Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.”

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 disebutkan bahwa, untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tersebut dilaksanakan dengan berpedoman pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). SPIP ini dimaksudkan dengan tujuan memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Adapun unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berdasarkan PP 60 tahun 2008 antara lain : a) Lingkungan pengendalian, b) Penilaian resiko c) Kegiatan pengendalian d) Informasi dan komunikasi e) Pemantauan pengendalian intern.

Laporan keuangan sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (SPAP) No.1 menjelaskan definisi sebagai laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan menjadi alat yang

digunakan untuk menunjukkan capaian kinerja dan pelaksanaan fungsi pertanggungjawaban dalam suatu entitas (Choiriyah, 2010).

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) disebutkan bahwa pengungkapan kebijakan akuntansi yang diterapkan akan membantu pembaca untuk dapat menghindari kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan. Pengungkapan kebijakan akuntansi dalam laporan keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dimengerti. Pengungkapan kebijakan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan yang sangat membantu pemakai laporan keuangan, karena kadang kadang perlakuan yang tidak tepat atau salah digunakan untuk suatu komponen laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, atau laporan lainnya yang merupakan pengungkapan kebijakan akuntansi terpilih. Selain itu penetapan kebijakan akuntansi terpilih dimaksudkan untuk menjamin adanya keseragaman pencatatan dalam setiap transaksi akuntansi di setiap satuan kerja.

Tujuan dari laporan keuangan sektor publik, berbeda dengan sektor swasta. Laporan keuangan sektor swasta mempunyai tujuan untuk mengukur laba, sedangkan tujuan laporan sektor publik menurut *Government Accounting Standard Board* (2009:54) adalah sebagai berikut: Mempertanggungjawabkan pelaksanaan fungsinya, Melaporkan hasil operasi, Melaporkan kondisi keuangan, Melaporkan sumberdaya jangka panjang.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan fase terakhir dari proses akuntansi pemerintah daerah. Laporan keuangan sektor publik pada hakekatnya merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat atas pengelolaan dana publik baik dari pajak, retribusi atau transaksi lainnya.

Komponen laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yakni: 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA), 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), 3) Neraca, 4) Laporan Operasional (LO) 5) Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), 6) Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).

## Penelitian Terdahulu

**Tabel 1. Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Nurendah Ragillita Untary (2015)	Pengaruh system informasi akuntansi, system pengendalian intern dan kualitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan daerah dengan faktor eksternal sebagai pemoderasi	Hasil penelitian ini membuktikan bahwa system informasi akuntansi, system pengendalian internal dan kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan
2	Hasnidar (2016)	Pengaruh sistem informasi akuntansi berbasis komputer dan pengendalian internal terhadap kualitas keuangan di instansi pemerintahan	Hasil penelitian ini membuktikan bahwa sistem informasi akuntansi berbasis komputer tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah sedangkan system pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah
3	Novtania Mokoginta (2017)	Pengaruh sistem pengendalian intern dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan	Hasil penelitian ini membuktikan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh negatif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan sedangkan sistem akuntansi

			keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan
4	Frista Cahirina (2019)	Pengaruh penerapan system informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan	Hasil penelitian ini membuktikan bahwa penerapan system informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan

### Pengembangan Hipotesis

Menurut Hasnidar (2016), dalam hal system informasi akuntansi dalam penyajian informasi yang lengkap maka akan menciptakan kualitas laporan keuangan serta nantinya menimbulkan kualitas laporan keuangan yang baik. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa system informasi akuntansi berbasis komputer tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

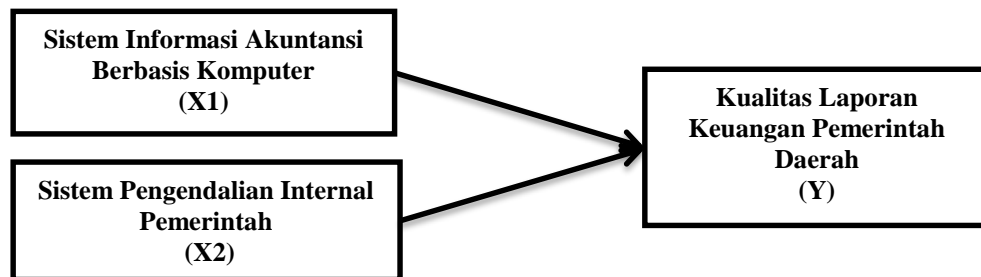
H1: Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Komputer Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Menurut Hasnidar (2016), menyatakan bahwa masih ditemukannya kebocoran di dalam laporan keuangan oleh BPK, menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah belum memenuhi karakteristik/nilai informasi yang disyaratkan. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa system pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

H2 : Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

### Model Penelitian

Gambar 1 Model Penelitian



### METODE PENELITIAN

Sampel dalam penelitian ini Bendahara Pengeluaran dan PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan). Teknik pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner dibatasi berdasarkan skala likert dengan skala 1-5 berdasarkan tingkat persetujuan responden (Lalita,2019). Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini Purposive Sampling yakni pengambilan anggota sampel dengan kriteria sebagai berikut: 1. Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Bendahara Pengeluaran, 2. Lama kerja minimal satu tahun ke atas. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Jenis penelitian adalah penelitian kuantitatif yaitu skor jawaban kuesioner masing – masing responden. Variabel independen: Sistem informasi akuntansi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Variabel dependen: Kualitas Laporan Keuangan. Uji Kualitas Data: Uji Validitas, Uji Reliabilitas, Uji Asumsi Klasik, Multikolinearitas, heteroskedastisitas dan Uji Normalitas. Uji Hipotesis: Analisis Regresi Linear Berganda dan Uji-T.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 25 Organisasi Perangkat Daerah terdiri dari 20 Dinas, dan 5 Badan di Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru. Sampel dalam penelitian ini adalah PPK dan Bendahara pada masing-masing OPD. Adapun kuesioner yang disebar adalah sebanyak 50 buah kuesioner dan semuanya kembali sehingga kuesioner yang diolah adalah 50 buah kuesioner

**Tabel 2. Uji Statistik Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
SIA BERBASIS KOMPUTER	50	28.00	45.00	38.1400	4.08586
SPIP	50	23.00	45.00	35.1200	4.73648
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN	50	23.00	45.00	37.3200	4.49689
Valid N (listwise)	50				

Sumber: Data primer yang diolah, 2021

**Tabel 3. Uji Normalitas**

		Unstandardized Residual
N		50
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0
	Std. Deviation	3.20523833
Most Extreme Differences	Absolute	0.086
	Positive	0.067
	Negative	-0.086
Test Statistic		0.086
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber : Data primer yang diolah, 2021

**Tabel 4. Uji Koefisien Determinasi**

### Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.701 <sup>a</sup>	.492	.470	3.27272

Sumber : Data primer yang diolah, 2021

Nilai Adjusted R Square (R<sup>2</sup>) sebesar 0.49.2% atau 49.2%. Koefisien determinasi Adjusted R Square (R<sup>2</sup>) sebesar 0.49.2 memberi pengertian bahwa 49.2% kualitas laporan keuangan dapat dijelaskan oleh SIA berbasis komputer dan SPIP sedangkan 50.8% dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.



**Tabel 5. Hasil Uji Statistik t  
 Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	10.89	4.395		2.478	0.017
1 SIA	0.231	0.176	0.21	1.311	0.196
SPIP	0.502	0.152	0.528	3.3	0.002

Sumber : Data primer yang diolah, 2021

Nilai signifikansi hasil uji t pada SIA berbasis komputer (X1) sebesar  $0.196 > 0,05$ , hal ini berarti menolak H1 sehingga dapat disimpulkan bahwa SIA (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y). Signifikansi nilai hasil uji t pada SPIP (X2) sebesar  $0.002 < 0,05$  yang berarti menerima H2 sehingga dapat disimpulkan bahwa SPIP (X2) berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y).

Pengujian statistik pada hipotesis (H1) menunjukkan bahwa SIA Berbasis Komputer (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y). Pada tabel dapat dilihat hasil nilai uji statistik t variabel SIA sebesar 1.311 dengan nilai signifikansi t sebesar 0.196 lebih besar dari  $\alpha = 0,05$ . Dengan demikian hipotesis H1 ditolak sehingga dapat dikatakan bahwa SIA berbasis komputer tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Hasil pengujian hipotesis pertama ini membuktikan bahwa tidak adanya pengaruh signifikan SIA berbasis komputer terhadap kualitas laporan keuangan. Terkait dengan fenomena pada latar belakang penelitian ini, dapat dikatakan bahwa penerapan SIA yang tidak optimal tentunya tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan pemerintah daerah. Penerapan SIA berbasis komputer tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan berarti SIA tidak memenuhi fungsinya dalam hal ini memberikan informasi secara tepat waktu yang merupakan bagian dari nilai informasi yang dapat dicapai dengan peran teknologi yang digunakan di dalam organisasi.

Pengujian statistik pada hipotesis (H2) menunjukkan bahwa SPIP (X2) tidak berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y). Pada tabel dapat dilihat hasil nilai uji statistik t variabel SPIP sebesar 3.300 dengan nilai signifikansi t sebesar 0.002 lebih kecil dari  $\alpha = 0,05$ . Dengan demikian hipotesis H2 diterima sehingga dapat dikatakan bahwa SPIP berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Hasil pengujian hipotesis kedua ini membuktikan bahwa adanya pengaruh signifikan SPIP terhadap kualitas laporan keuangan. Penerapan sistem pengendalian intern pemerintah yang dijalankan secara efektif dan efisien tentunya berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Dengan adanya sistem pengendalian yang baik dari internal pemerintah maka laporan keuangan tentunya dapat memenuhi karakteristik/nilai informasi yang disyaratkan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan dan hal ini akan berdampak positif terhadap opini atas laporan keuangan tersebut.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan diatas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1. Hipotesis Pertama (H1) menunjukkan bahwa Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Komputer tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. 2. Hipotesis Kedua (H2) menunjukkan bahwa SPIP berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Adapun Keterbatasan dalam penelitian ini: 1. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan di dalam penelitian ini hanya terdiri dari dua yaitu sistem informasi akuntansi berbasis komputer dan sistem pengendalian intern pemerintah sedangkan mungkin saja masih banyak faktor lain yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan. 2. Adanya keterbatasan penelitian dengan menggunakan kuesioner yaitu terkadang jawaban yang diberikan oleh sampel tidak menunjukkan keadaan yang sebenarnya. 3. Adanya keterbatasan penelitian dengan tidak secara keseluruhan Organisasi Perangkat Daerah pada Kabupaten Kepulauan Aru menjadi Sampel dalam penelitian ini sehingga mungkin saja mempengaruhi kualitas penelitian ini.

Implikasi penelitian ini membuktikan pentingnya pengendalian internal yang baik dari pimpinan terhadap kinerja pegawai agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Sistem pengendalian internal yang baik menjadikan pegawai bekerja sesuai dengan tujuan organisasi sehingga kualitas yang dihasilkan juga baik

## **REFERENSI**

- Frista Cahirina, 2019, Pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan. *Jurnal*
- Governmental Accounting Standards Board (GASB) issued Statement No. 54, Fund Balance Reporting and Governmental Fund Type Definitions
- Hasnidar, 2016 Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Komputer Dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Keuangan Di Instansi Pemerintahan Kab. Bone (Studi Kasus Satuan Kerja Pemerintahan Daerah Kab. Bone).
- Nurendah Ragilita Untary, 2015, Pengaruh system informasi akuntansi, sistem pengendalian intern dan kualitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan daerah dengan faktor eksternal sebagai pemoderasi.
- Novtania Mokoginta, 2017, Pengaruh system pengendalian intern dan system akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan, *jurnal*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual
- Rahadi, Dedi Rianto. 2013. "Peranan Teknologi Informasi Dalam Peningkatan Pelayanan Di Sektor publik". Disampaikan dalam Seminar Nasional Teknologi. Yogyakarta
- Undang-Undang No.32 Tahun 2004, Arti Dari Otonomi Daerah Adalah "Hak, Wewenang, Dan Kewajiban Daerah Otonom Guna Mengatur Dan Mengurus Sendiri Urusan Pemerintahannya Serta Kepentingan Masyarakat Seseuai Dengan Undang – Undang Yang Berlaku.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah